

**FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PARTISIPASI MAHASISWA PADA
PELAKSANAAN PEMILIHAN RAYA MAHASISWA FKIP
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020
(STUDI PENDIDIKAN POLITIK DI PERGURUAN TINGGI MELALUI
ORGANISASI KEMAHASISWAAN)**

(Skripsi)

**Oleh
Amiza Rezika
1813032025**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PARTISIPASI MAHASISWA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN RAYA MAHASISWA FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020 (STUDI PENDIDIKAN POLITIK DI PERGURUAN TINGGI MELALUI ORGANISASI KEMAHASISWAAN)

Oleh

Amiza Rezika

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi mahasiswa pada pelaksanaan pemira FKIP Unila tahun 2020 kemudian mengkomparasikan faktor mana yang paling signifikan berpengaruh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 98 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik utama yaitu angket dan menggunakan teknik penunjang yaitu wawancara. Analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan distribusi frekuensi indikator dan dibantu SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab rendahnya partisipasi mahasiswa pada pelaksanaan pemira FKIP tahun 2020 disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menunjukkan persentase 45,91% kurang berpengaruh, 50% cukup berpengaruh dan 4,08% berpengaruh. Sedangkan faktor eksternal menunjukkan persentase 29,59% kurang berpengaruh, 46,93% cukup berpengaruh dan 23,46% berpengaruh. demikian dapat disimpulkan bahwa secara signifikansi faktor eksternal lebih signifikan berpengaruh dalam menyebabkan rendahnya partisipasi mahasiswa pada pelaksanaan pemira FKIP Unila tahun 2020.

Kata kunci: *Partisipasi, Mahasiswa FKIP, Pemilihan Raya*

ABSTRACT

FACTORS CAUSING THE LOW STUDENT PARTICIPATION IN THE 2020 FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG STUDENT ELECTIONS (STUDY OF POLITICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION THROUGH STUDENT ORGANIZATIONS)

By

Amiza Rezika

The purpose of this research is to find out what factors are causing the low student participation in the implementation of the 2020 Unila Faculty of Teacher Training and Education, then to compare which factors have the most significant effect. The method used in this study is a survey method with a quantitative approach. The subjects in this study were students of the Faculty of Teacher Training and Education, University of Lampung. The sample used in this study amounted to 98 respondents. Data collection techniques in this study used the main technique, namely questionnaires and used supporting techniques, namely interviews. Data analysis in this study used SPSS version 20. The results showed that the factors causing low student participation in the 2020 FKIP program were caused by two factors, namely internal factors and external factors. The internal concentration factor showed 45.91% had little effect, 50% had enough effect and 4.08% had effect. While external factors show the proportion of 29.59% less influential, 46.93% moderately influential and 23.46% influential. Thus it can be concluded that significantly external factors have a more significant influence in causing low student participation in the implementation of the 2020 Unila FKIP program.

Keyword: *Participation, FKIP Students, General Election*

**FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PARTISIPASI MAHASISWA PADA
PELAKSANAAN PEMILIHAN RAYA MAHASISWA FKIP
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020
(STUDI PENDIDIKAN POLITIK DI PERGURUAN TINGGI MELALUI
ORGANISASI KEMAHASISWAAN)**

**Oleh
AMIZA REZIKA**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi PPKn
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PARTISIPASI MAHASISWA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN RAYA MAHASISWA FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020 (STUDI PENDIDIKAN POLITIK DI PERGURUAN TINGGI MELALUI ORGANISASI KEMAHASISWAAN)

Nama Mahasiswa

: Amiza Rezika

NPM

: 1813032025

Program Studi

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan

: Pendidikan IPS


Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
NIP 19611214 199303 1 001

Pembimbing II,



Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.
NIP 19930916 201903 2 021

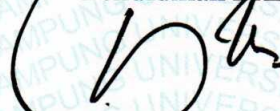
2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial



Dedy Miswak, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003

Ketua Program Studi
Pendidikan PKn



Yanisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

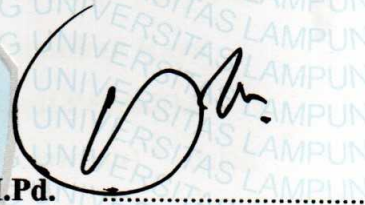
Ketua : Drs. Berchah Pitoewas, M.H.



Sekretaris : Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

**Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
NIP. 19651530 199111 1 001**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 04 Mei 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Amiza Rezika
NPM : 1813032025
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Puspa Negara RT. 02 RW. 03, Desa Kembahang,
Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi dengan judul **“Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Mahasiswa pada Pelaksanaan Pemilihan Raya Mahasiswa FKIP Universitas Lampung Tahun 2020 (Studi Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi Melalui Organisasi Kemahasiswaan).”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan penelitian yang dilaksanakan. Skripsi ini bukan hasil menjiplak ataupun hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Bandar Lampung, 12 Mei 2023



Amiza Rezika

NPM 1813032025

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Amiza Rezika biasa dipanggil Amiza. Penulis dilahirkan di Lampung Barat, pada tanggal 25 Desember 1999. Penulis merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Azdi dan Ibu Roaida.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Kembahang pada tahun 2012, kemudian Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat pada tahun 2015, dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Barat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Provinsi Lampung dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Ilmiah (KKI) dengan tujuan Yogyakarta-Bandung-Jakarta tahun 2020 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Canggus Kabupaten Lampung Barat serta melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMA Negeri 1 Liwa tahun 2021. Selama menjalani studi, penulis juga aktif dalam organisasi kampus diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung (BEM FKIP Unila) sebagai Ketua BEM FKIP Unila tahun 2021 dan Forum Pendidikan Kewarganegaraan (Fordika) sebagai Kepala Bidang Luar Negeri tahun 2020.

MOTTO

**“Jangan menunggu benar-benar pantas sebelum memulai sesuatu.
jika pantas adalah ukuran, maka selamanya kita tidak akan pernah memulai”**

(Learning by doing)

-Amiza Rezika-

Persembahan

*Alhamdulillahorobbil'alamiin
Segala puji bagi Allah Swt,
Sholawat serta Salam selalu tercurah kepada Uswatun Hasanah
Rasulullah Muhammad SAW*

Ku persembahkan karya ini sebagai tanda cinta dan kasih sayangku kepada:

*Kedua orangtuaku Bapak dan Ibu tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik
dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan dan melakukan semua yang
terbaik untuk keberhasilan dan kebahagiaanku.*

*Almamater tercinta Program Studi PPKn Jurusan P.IPS
Universitas Lampung.*

SANWACANA

Syukur Alhamdulillah berkat dan rahmat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Mahasiswa Pada Pelaksanaan Pemilihan Raya Mahasiswa FKIP Universitas Lampung Tahun 2020 (Studi Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi Melalui Organisasi Kemahasiswaan)**”. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

5. Bapak Dedy Miswar, S.Si., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas I yang telah memberi kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H, selaku pembimbing I terima kasih yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing Akademik (PA) dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan sumbangan pemikiran, kritik, saran, perhatian, motivasi dan semangat selama penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya;
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, saran, dan bantuan bermanfaat;
11. Staf Program Studi PPKn Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama mengadakan penelitian;

12. Mahasiswa FKIP Universitas Lampung yang telah bersedia bekerjasama dalam penelitian skripsi ini;
13. Untuk diri sendiri yang sudah berjuang sejauh ini;
14. Untuk kakak-kakakku Ngah Herlina, Abang Syahrial, Ngah Desi.
Keponakan-keponakanku (Ngah Nisa, Ngah Putri, Abang Dimas, Adek Salman, Adek Julian dan Adek Ghaisan) terimakasih untuk segala keceriaan yang menjadi semangatku dikala letih;
15. Sahabat seperjuangan yang selalu memberi saran masukan Amir, Kevin, Yonan, Ade Ihza, Aldi, Maul, Rozak, Ihsan, Ade Arief, Wahyu, Dayat, Sigit, Irpan, Inggi, Retnok, Arak dan yang lain tidak bisa disebut satu-persatu;
16. Keluarga CBTB Etos Lampung angkatan 18: Rifai, Rendi, Wahyudi, Hilmy, Syahrul, Soni, Rican, Dendi, Khozin yang telah menjadi bagian hidup dua tahun di asrama Beasiswa Etos Lampung;
17. Sahabat Serasan Seandanan: Fitria, Angga, Ayu, Muf, Fajar, Putri, Rizky, Indah, Seli, Roza, Fajri, Nabela, Sri, Arifi, Arak, dan Nazir yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran selama di BEM FKIP Unila 2021;
18. Sahabat bujang Aktualisasi Karya Rohim, Zakir, Angger, Angga, Amir, Kukuh, Jihan, Wahid, Alfath dan Aris yang senantiasa menyemangati dan menjadi pengingat di kala futur;
19. Keluarga Gerakan Ayo Kuliah Lampung Pak Slamet, Pak Aji, Memet, Jun, Arum dan Sinta yang telah memberikan banyak pengalaman dan kesempatan untuk memberikan manfaat lebih;

20. Teman-Teman Program Studi PPKn angkatan 2018 yang selama ini menimba ilmu bersama. Kita disatukan oleh pendidikan dan dipisahkan oleh masa depan. Semoga apa yang kita cari selama ini bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT;

21. Almamater Universitas Lampung tercinta yang telah mendewasakanku.

Semoga kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT sehingga skripsi ini bermanfaat. Aamiin Ya Robbal'Alamiin.

Bandar Lampung, Mei 2023
Penulis

Amiza Rezika
NPM. 1813032025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
COVER JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Batasan Masalah	11
1.4. Rumusan Masalah	11
1.5. Tujuan Penelitian	11
1.6. Manfaat Penelitian	11
A. Manfaat Teoritis	11
B. Manfaat Praktis	12
1.7. Ruang Lingkup Penelitian	12
A. Ruang Lingkup Ilmu	12

	B. Ruang Lingkup Objek Penelitian	13
	C. Ruang Lingkup Subjek Penelitian	13
	D. Ruang Lingkup Tempat Penelitian.....	13
	E. Ruang Lingkup Waktu Penelitian.....	13
II.	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1. Deskripsi Teori.....	14
	A. Tinjauan Umum Partisipasi.....	14
	1. Pengertian Partisipasi	14
	2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi.....	19
	B. Tinjauan Umum Partisipasi Mahasiswa di Perguruan Tinggi.....	20
	1. Aspek Akademik.....	20
	2. Aspek Organisatoris	21
	3. Aspek Sosial Politik	23
	C. Tinjauan Umum Partisipasi dan Kesadaran Politik.....	25
	1. Pengertian Partisipasi Politik	25
	2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik.....	28
	3. Jenis Partisipasi Politik	32
	4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik.....	33
	5. Indikator Partisipasi Politik.....	35
	6. Pengertian Kesadaran Politik	36
	7. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran Politik	37
	8. Indikator Kesadaran Politik.....	38
	D. Tinjauan Umum Lembaga Kemahasiswaan di FKIP Universitas Lampung.....	39
	2.2. Kajian Penelitian Relevan	41
	2.3. Kerangka Pikir	43
III.	METODOLOGI PENELITIAN	
	3.1. Metode Penelitian.....	46
	3.2. Populasi dan Sampel	46
	A. Populasi	46
	B. Sampel	47
	3.3. Variabel Penelitian	49
	3.4. Definisi Konseptual dan Operasional	49
	A. Definisi Konseptual.....	49
	B. Definisi Operasional	49
	3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	50
	A. Angket	50
	B. Wawancara	51
	3.6. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	52
	A. Uji Validitas	52
	B. Uji Reliabilitas.....	53
	3.7. Teknik Analisis Data.....	54
	A. Analisis Distribusi Frekuensi	54
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1. Langkah-Langkah Penelitian	56

A. Persiapan Pengajuan Judul	56
B. Penelitian Pendahuluan	56
C. Pengajuan Rencana Penelitian.....	57
D. Penyusunan Alat Pengumpulan Data	57
E. Pelaksanaan Uji Coba Penelitian	57
1. Uji Coba Validitas Angket	58
2. Uji Coba Reliabilitas Angket	60
4.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
A. Sejarah Singkat FKIP Universitas Lampung	62
B. Profil FKIP Universitas Lampung.....	63
C. Situasi dan Kondisi Fakultas	64
1. Keadaan Fakultas	64
2. Keadaan Pegawai.....	64
D. Visi Misi dan Tujuan FKIP Universitas Lampung	67
E. Distribusi Sarana dan Prasarana FKIP Universitas Lampung	69
4.3. Deskripsi Penelitian	70
A. Pengumpulan Data	70
B. Penyajian Data.....	70
1. Indikator Faktor Internal	70
2. Indikator Faktor Eksternal.....	72
3. Variabel Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Mahasiswa Pada Pelaksanaan Pemira FKIP Unila Tahun 2020	74
4.4. Pembahasan Hasil Penelitian	76
A. Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Mahasiswa Pada Pelaksanaan Pemira FKIP Unila tahun 2020	78
4.5. Keterbatasan Penelitian.....	86
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	87
3.2. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Calon Anggota DPM FKIP Tahun 2021	6
Tabel 1.2. Data Perbandingan Hasil Pemira Pada Beberapa Perguruan Tinggi	8
Tabel 2.1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik.....	29
Tabel 3.1. Jumlah Mahasiswa Aktif FKIP Per jurusan Tahun 2020.....	47
Tabel 3.2. Daftar Mahasiswa FKIP Per jurusan yang Menjadi Sampel.....	48
Tabel 3.3. Indeks Koefisien Reliabilitas	53
Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Angket.....	58
Tabel 4.2. Hasil Uji Reliabilitas Angket	60
Tabel 4.3. Daftar Nama Dekan FKIP Universitas Lampung dari tahun 1981- Sekarang	62
Tabel 4.4. Sarana dan Prasarana FKIP Universitas Lampung	69
Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Indikator Faktor Internal	72
Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Indikator Faktor Eksternal.....	74
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Akumulasi Variabel Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Mahasiswa Pada Pelaksanaan Pemira FKIP Tahun 2020.....	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	46

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Karakteristik negara demokrasi adalah keterlibatan dan partisipasi aktif anggota masyarakat dalam berbagai aktivitas kenegaraan. Khususnya partisipasi dalam bidang politik. Miriam Budiardjo (2008) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Partisipasi politik secara umum adalah suatu kegiatan warga negara baik sebagai perseorangan maupun dengan berkelompok dalam bidang politik. Kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk-bentuk atau jenis-jenis partisipasi politik ketika meliputi; pemberian suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai politik dan sebagainya. Partisipasi politik dibedakan menjadi dua, aktif dan pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan, mengkritik kebijakan, membayar pajak, ikut serta dalam pemilihan pimpinan pemerintahan dan sebagainya (Syarif Firmansah, 2020). Di sisi lain, partisipasi pasif antara lain dapat berupa kegiatan menaati peraturan, menerima dan melaksanakan keputusan atau kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi partisipasi yang bersifat sukarela (otonom), dan partisipasi atas desakan orang lain (dimobilisasi) atau istilah lain biasa disebut dengan *autonomous participation* (partisipasi otonom) dan *mobilized participation* (partisipasi yang

dimobilisasikan). Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara (Maran, 2007)

Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk oleh mahasiswa merupakan *miniature state* atau *student government* yang melaksanakan tugas dan fungsi seperti sebuah negara. Konsekuensi dari organisasi kemahasiswaan sebagai *student government* ialah segala aktivitasnya merupakan aktivitas politik. Hal ini diungkapkan oleh Sitepu (2012) yang menyatakan bahwa politik adalah segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan mengikuti organisasi pemerintahan mahasiswa maka seorang mahasiswa sedang belajar berpolitik.

Mahasiswa merupakan golongan dalam masyarakat yang sedang mendapatkan pendidikan tertinggi, mempunyai perspektif luas untuk bergerak pada seluruh aspek kehidupan serta merupakan generasi yang bersinggungan langsung dengan kehidupan akademis dan politik. Mahasiswa merupakan cendekiawan masa depan yang nantinya akan terjun ke dalam dunia nyata (masyarakat). Oleh karenanya mahasiswa berorganisasi dengan membentuk *student government* dalam rangka pengembangan diri. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 14 disebutkan bahwa pengembangan minat, bakat, serta penalaran mahasiswa tersebut dilakukan melalui kegiatan kurikuler, kegiatan kokurikuler sebagai kegiatan pendukung proses pendidikan, dan kegiatan ekstrakurikuler sebagai kegiatan yang dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan. Kemudian Ditjen dikti (2022) menyatakan bahwa organisasi kemahasiswaan (ormawa) merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas dirinya sebagai mahasiswa berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan positif dan kreatif melalui peran serta dalam berbagai kegiatan yang relevan. Seperti yang disampaikan oleh M. Rusli Karim (2015) bahwa organisasi mahasiswa adalah proses dalam menyiapkan diri untuk memasuki organisasi yang lebih besar setelah keluar dari perguruan tinggi. Jika saat berorganisasi mahasiswa telah tertanam

kebiasaan disiplin dan patuh terhadap aturan, diharapkan tumbuh pola kesadaran semacam itu saat sudah terjun ke masyarakat.

Kebiasaan patuh terhadap aturan harus tercerminkan dalam keseharian seorang mahasiswa baik statusnya sebagai bagian dari masyarakat ataupun saat melaksanakan aktivitas keorganisasian dalam lingkup kampus salah satunya pemberian hak suara dalam pemilihan raya mahasiswa (pemira). Pemberian suara dalam kegiatan pemira merupakan bentuk partisipasi politik yang terbiasa, yang seringkali lebih luas daripada bentuk partisipasi politik lainnya. Berbeda dengan itu, kegiatan seperti demonstrasi, penandatanganan petisi, konfrontasi, pemogokan dan serangkaian tindakan kekerasan merupakan bentuk partisipasi politik nonkonvensional. Mahasiswa merupakan generasi penerus yang akan memegang estafet kepemimpinan bangsa. Mahasiswa merupakan kaum intelektual yang memiliki idealitas sebagai kaum ilmiah. Mahasiswa juga berperan aktif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan yang paling penting adalah mahasiswa menjadi kontrol terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Layaknya lembaga pemerintahan yang memiliki dewan perwakilan rakyat yang berfungsi sebagai lembaga legislatif pembuat kebijakan dan presiden selaku pemimpin lembaga eksekutif yang bertugas sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan. Mahasiswa juga memiliki perwakilan legislatif dan pemimpin eksekutif yang dapat memperjuangkan segala bentuk aspirasi mahasiswa serta dapat memperjuangkan hak-hak mahasiswa dalam wadah perguruan tinggi. Wadah organisasi pada perguruan tinggi tersebut dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Peranan dan fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa di perguruan tinggi merupakan pusat sentral dan pimpinan tertinggi dalam pengambilan kebijakan di kalangan masyarakat mahasiswa universitas. Dalam hal ini DPM dan BEM harus mengambil keputusan dan kebijakan dalam suatu pemerintahan mahasiswa, harus kritis terhadap

kebijakan-kebijakan baik di dalam lingkungan kampus maupun luar kampus. DPM dan BEM merupakan ujung tombak dalam menjalankan segala aspek ketata pemerintahan dan penyampaian aspirasi masyarakat kampus. Membela masyarakat yang merasa dirugikan oleh pejabat universitas dan menstabilkan keadaan mahasiswa baik berupa keamanan, kesejahteraan, juga kebebasan dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun dalam tulisan.

Demikian juga pada lingkup Universitas Lampung. Unila yang merupakan salah satu universitas terkemuka di Sumatera bahkan di Indonesia memiliki susunan organisasi kemahasiswaan (ormawa) yang terdiri atas Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Menurut Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan yang tercantum pada pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disebut dengan ormawa adalah wadah kegiatan mahasiswa Unila untuk mengembangkan bakat, minat, penalaran, dan potensi kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, serta rasa kebangsaan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 11 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 18 Tahun 2021 tentang organisasi kemahasiswaan menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan DPM adalah ormawa yang mewakili mahasiswa di tingkat Unila dan Fakultas. Dan pada ayat 12 menyatakan Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan BEM adalah ormawa yang melaksanakan amanah mahasiswa di tingkat Unila dan Fakultas. Jadi, dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pemerintahan mahasiswa (*student government*) terdapat lembaga kemahasiswaan yang mewadahi pelaksanaannya yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) merupakan ormawa yang mewakili representasi mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan ormawa yang melaksanakan amanah mahasiswa. Selanjutnya, DPM dan BEM di Universitas Lampung memiliki tingkatan masing-masing yaitu DPM dan BEM tingkat Universitas serta DPM dan BEM pada tingkatan Fakultas.

Sebagai upaya melanjutkan estafet kepemimpinan DPM dan BEM kepada generasi selanjutnya maka dilakukan dengan cara pemilihan raya mahasiswa (pemira). Dalam Undang-undang Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemira pada Pasal 1 Ayat 1 dikatakan bahwa pemilihan raya mahasiswa Universitas Lampung selanjutnya disebut pemira adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam KBM Unila. Pada pelaksanaan pemilihan raya mahasiswa (pemira) setiap tahunnya dibentuk panitia khusus (pansus) yang menjadi penyelenggara resmi dalam setiap bagian pelaksanaan pemira. Hal ini sejalan dengan rumusan pasal 2 Kepmendikbud Nomor 155 Tahun 1998 yang berbunyi Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan perananan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa. Sebagaimana pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Raya Mahasiswa menyatakan bahwa panitia khusus pemilihan raya mahasiswa, selanjutnya disebut pansus Universitas atau pansus Fakultas, adalah lembaga penyelenggara pemira di Unila yang bersifat independen. Kegiatan pemira dilaksanakan oleh pansus yang dibagi pada tataran pemira tingkat Universitas dilaksanakan oleh pansus pemira universitas untuk memilih anggota DPM universitas serta presiden dan wakil presiden mahasiswa dan pemira pada tingkat Fakultas dilaksanakan oleh pansus pemira fakultas untuk memilih anggota DPM fakultas serta gubernur dan wakil gubernur mahasiswa fakultas.

Setiap tahun yang umumnya bertepatan pada bulan Oktober dilaksanakan rangkaian tahapan pelaksanaan pemira. Begitupun pada tahun 2020, dilaksanakan proses tahapan pemira baik pada tingkat Universitas maupun pada tingkat Fakultas. Pada penelitian ini, penulis akan berfokus meneliti pelaksanaan pemira pada tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung tahun 2020. Selain karena proses pemira di lingkup universitas yang tersendat karena adanya sengketa antara pihak

pasangan calon nomor urut 01 dan 02 pada pemilihan calon presiden BEM Universitas yang belum menemui titik penyelesaian, penulis yang merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Unila, selain sebagai mahasiswa FKIP yang memiliki hak untuk memilih juga merupakan salah satu kontestan dalam pelaksanaan pemilihan raya mahasiswa (pemira) FKIP. Oleh karenanya, penulis lebih memilih untuk meneliti pelaksanaan pemira di lingkup FKIP karena penulis bersinggungan langsung dalam proses pelaksanaannya. Selain itu juga penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan pemira pada tahun 2020 karena untuk pertama kalinya proses pelaksanaan pemira dilaksanakan secara daring yaitu menggunakan sistem pencoblosan *e-voting* yang disebabkan karena peristiwa pandemi *covid-19*, diharapkan dengan pelaksanaan pemira secara daring yang mana mahasiswa tidak perlu datang langsung ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) secara berdesak-desakan dan mengantri dengan waktu yang lama dapat meningkatkan rasa antusias mahasiswa dalam menggunakan hak suaranya. Tujuan dari *e-voting* adalah untuk memudahkan mahasiswa dalam berpartisipasi, sehingga tingkat partisipasi dalam pemira diharapkan meningkat.

Pelaksanaan pemira FKIP tahun 2020, diikuti oleh 23 orang calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FKIP yang terbagi dari beberapa jurusan.

Tabel 1.1 Jumlah calon anggota DPM FKIP tahun 2021

Jurusan	Jumlah Calon
Pendidikan IPS	6 Orang
Pendidikan MIPA	6 Orang
Pendidikan Bahasa dan Seni	5 Orang
Ilmu Pendidikan	6 Orang
Jumlah	23 Orang

Sumber: SK Pansus XXII Nomor 10 tahun 2020

Kemudian 23 calon anggota DPM FKIP ini terpilih secara aklamasi dikarenakan jumlah pendaftar calon anggota DPM FKIP tidak melebihi

jumlah kursi anggota DPM FKIP tersedia yang telah ditetapkan oleh Pansus Pemira FKIP yang terlampir dalam SK Pansus XXII Pemira FKIP Unila Nomor 10 tentang Penetapan jumlah kursi DPM FKIP Unila. Kemudian pada calon gubernur dan wakil gubernur mahasiswa BEM FKIP diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon pendaftar. Adapun rangkaian tahapan pelaksanaan pemira FKIP tahun 2020 diawali dengan tahap pendaftaran, kemudian tahap verifikasi berkas, kampanye, debat pasangan calon, masa reses sampai dengan tahapan pemilihan yang dilaksanakan secara daring (*e-voting*).

Pelaksanaan pemira FKIP tahun 2020 terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana terlampir dalam SK Pansus XXII Pemira FKIP Unila Nomor 18 tentang Penetapan Pembaruan Daftar Pemilih Tetap Pemira FKIP Universitas Lampung Tahun 2020 berjumlah 5.945 mahasiswa yang terdiri dari seluruh mahasiswa aktif di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Proses pelaksanaan pemira menggunakan laman web *pemiraunila.com* yang dilaksanakan secara serentak dan terintegrasi dengan beberapa fakultas di lingkungan Universitas Lampung.

Penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis kepada panitia khusus (pansus) pemira FKIP 2020 di dapatkan data dari total 5.945 mahasiswa aktif FKIP yang memiliki hak suara dan terdaftar dalam DPT, hanya 776 mahasiswa yang menggunakan hak suaranya pada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur mahasiswa BEM FKIP 2020. Artinya hanya 13,05% mahasiswa FKIP yang menggunakan hak suaranya, persentase ini tergolong sangat rendah jika dikaitkan dengan tingkat partisipasi politik. Padahal jika dikomparasikan dengan beberapa kampus lain yang juga menggunakan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan pemira terjadi peningkatan partisipasi jumlah pemilih yang signifikan, namun yang terjadi pada pemira FKIP Universitas Lampung justru sebaliknya. Berikut penulis sajikan data perbandingan hasil pelaksanaan pemira pada beberapa perguruan tinggi yang sebelumnya dilaksanakan secara langsung (*luring*) kemudian dilaksanakan menggunakan sistem *e-voting* (*daring*).

Tabel 1.2 Data Perbandingan Hasil Pemira Pada Beberapa Perguruan Tinggi

No.	Nama Kampus	2019	2020
1.	Universitas Gadjah Mada	14.787	17.443
2.	Universitas Sriwijaya	10.101	17.907
3.	Universitas Negeri Yogyakarta	9.214	12.176
4.	Universitas Bengkulu	4.641	9.129

Sumber: Official akun pemira masing-masing perguruan tinggi

Perbandingan data yang penulis dapatkan diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya partisipasi mahasiswa pada pelaksanaan pemira FKIP tahun 2020.

Pada penelitian pendahuluan penulis melakukan wawancara secara virtual melalui *platform* aplikasi *whatsapp* terhadap 5 orang yaitu 2 orang perwakilan pansus pemira FKIP tahun 2020 serta 3 orang mahasiswa FKIP yang dipilih secara acak. Pada wawancara virtual tersebut penulis meminta responden untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang membuat partisipasi politik mahasiswa pada pemira FKIP tahun 2020 tergolong rendah. Adapun kesimpulan data pendahuluan yang didapat faktor penyebab rendahnya partisipasi mahasiswa pada pelaksanaan pemira terdiri atas dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa atau faktor internal dan faktor yang berasal dari luar diri mahasiswa atau faktor eksternal. Adapun faktor internal terdiri atas faktor teknis dan faktor akademik sementara itu untuk faktor eksternal terdiri atas faktor administrasi, faktor sosialisasi, faktor sistem dan faktor politik.

Tingkat partisipasi mahasiswa dalam pemira yang berkaitan dengan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin organisasi pemerintahan mahasiswa merupakan salah satu indikator keberhasilan dan berjalannya demokrasi di lingkungan kampus. Rendahnya partisipasi politik mahasiswa pada pemira BEM FKIP Unila seharusnya ditingkatkan dengan berbagai macam cara dan strategi yang tepat agar lebih baik kedepannya. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi politik dengan cara menumbuhkan kesadaran politik. Kesadaran politik dapat dibangun melalui sosialisasi politik, seperti

halnya yang diungkapkan oleh Michael Rush dan Philip. A (2011) bahwa yang dimaksud sosialisasi politik adalah proses pengaruh dimana seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Inti dari kesadaran politik adalah partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya dalam pemilihan umum yang salah satu indikatornya adalah kemelekan politik dalam masyarakat.

Indikator dari munculnya kesadaran berorganisasi mahasiswa salah satunya adalah munculnya partisipasi mahasiswa dan secara sadar menggunakan hak pilihnya dalam kegiatan pemilihan raya, serta tumbuhnya sikap tanggung jawab, baik tanggung jawab akan pilihannya dalam pemilihan tersebut maupun tanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai mahasiswa.

Terlebih bagi seorang mahasiswa Program Studi PPKn kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara khususnya dalam pelaksanaan partisipasi politik merupakan cerminan dari warga negara cerdas dan berkarakter. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Kartini (2016) mengemukakan bahwa PPKn di sekolah berperan sebagai pendidikan politik bagi siswa, salah satu tujuan pendidikan politik adalah membuat rakyat menjadi sadar politik. Sadar politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara tersebut salah satu bentuknya adalah memberikan partisipasi politik.

Menurut pandangan penulis, tingkat partisipasi politik mahasiswa dalam pelaksanaan pemira untuk menentukan siapa pemimpin pemerintahan mahasiswa sangat penting. Aktifnya mahasiswa dalam partisipasi politik kampus turut menentukan kualitas jalannya demokrasi, dimana dalam sebuah negara demokrasi rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi. Dengan partisipasi politik yang baik mahasiswa bisa ikut mengawal jalannya pemira sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyelewengan penyelenggaraan serta hal-hal lain yang tidak diinginkan. Dan dengan adanya partisipasi politik yang baik mahasiswa bisa mengawal kebijakan serta janji-janji politik yang telah disampaikan oleh pasangan calon

yang nantinya akan berdampak terhadap keberjalan aktivitas organisasi kemahasiswaan, penyampaian aspirasi serta upaya pelayanan kepada mahasiswa khususnya pengadvokasian terhadap mahasiswa yang mengalami kendala dalam perkuliahan. Selain itu, dengan membiasakan berpartisipasi aktif dalam politik kemahasiswaan akan menimbulkan budaya politik yang partisipatif, sehat dan bersih yang akan memberikan pengaruh signifikan pada dunia pasca kampus dan menjadi bagian dari masyarakat sepenuhnya.

Melihat data yang telah diuraikan diatas, maka penulis tergerak untuk meneliti serta memperoleh jawaban dan informasi yang objektif. Maka dengan ini penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Mahasiswa pada Pelaksanaan Pemilihan Raya Mahasiswa FKIP Universitas Lampung Tahun 2020 (Studi Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi Melalui Organisasi Kemahasiswaan)”** untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya partisipasi mahasiswa pada pelaksanaan pemira FKIP tahun 2020, mengidentifikasi faktor mana yang paling signifikan berpengaruh dalam menyebabkan rendahnya partisipasi mahasiswa serta memberikan saran untuk mengatasi faktor penyebab tersebut agar pada pelaksanaan pemira selanjutnya kesadaran politik mahasiswa meningkat serta pelaksanaan pemira bisa lebih baik, baik dari segi penyelenggaraan maupun partisipasi mahasiswa di dalamnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi dan kesadaran politik mahasiswa dalam menggunakan hak suaranya pada pelaksanaan pemira FKIP tahun 2020.
2. Panitia khusus (pansus) pelaksana pemira belum melakukan sosialisasi pelaksanaan pemira secara optimal sehingga banyak mahasiswa yang belum mengetahui informasi pemira secara menyeluruh.

3. Kurangnya pendekatan dan sosialisasi dari pasangan calon sehingga banyak mahasiswa yang belum mengetahui visi, misi dan program yang ditawarkan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas, maka batasan masalah penelitian ini adalah faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya partisipasi penggunaan hak suara mahasiswa pada pelaksanaan pemira FKIP tahun 2020 serta faktor mana yang paling signifikan berpengaruh dalam menyebabkan rendahnya partisipasi mahasiswa pada pelaksanaan pemira.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah yang ada maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

“Faktor mana yang paling signifikan berpengaruh dalam menyebabkan rendahnya partisipasi mahasiswa pada pelaksanaan pemilihan raya mahasiswa FKIP tahun 2020?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan faktor mana yang paling signifikan berpengaruh dalam menyebabkan rendahnya partisipasi mahasiswa pada pelaksanaan pemilihan raya mahasiswa FKIP Universitas Lampung tahun 2020.

1.6 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini membantu mengembangkan konsep, prinsip dan prosedur teoritis dalam konteks ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kawasan Politik dan Kenegaraan.

B. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, agar peneliti mengetahui faktor mana yang paling signifikan berpengaruh dalam menyebabkan rendahnya partisipasi mahasiswa pada pelaksanaan pemilihan raya mahasiswa FKIP Universitas Lampung tahun 2020
- b. Bagi panitia khusus pemira (pansus), diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan pedoman untuk meningkatkan upaya sosialisasi pelaksanaan pemira agar seluruh lapisan mahasiswa dapat mengetahui dan menjadi bagian dalam pelaksanaannya.
- c. Bagi DPM FKIP, sebagai pengarah pelaksanaan pemira diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi dalam menyiapkan pelaksanaan pemira khususnya pelibatan seluruh UKM, Hima dan Forkom prodi dalam menyukseskan pemira.
- d. Bagi kontestan pemira, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam membuat rancangan gagasan dan program yang dapat menjawab kebutuhan mahasiswa secara umum sehingga mahasiswa tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemira.
- e. Bagi dekanat FKIP, dengan hasil penelitian ini diharapkan pimpinan dekanat FKIP turut aktif dalam menjamin dan mengawal tegaknya nilai-nilai demokrasi dikalangan mahasiswa.
- f. Dengan hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi mahasiswa FKIP maupun mahasiswa secara umum bahwa partisipasi mahasiswa dalam menentukan pemimpin organisasi mahasiswa sangat penting dan menjadi indikator ketercapaian demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan mahasiswa (*student government*).

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

A. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian yang dilakukan akan menambah pengetahuan baru dalam dunia Pendidikan, khususnya dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karena dapat membantu dalam menambah kekayaan ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup Politik dan Kenegaraan, karena

secara umum penelitian ini akan mendeskripsikan apa saja penyebab rendahnya partisipasi mahasiswa pada pelaksanaan pemilihan raya mahasiswa FKIP.

B. Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian pada penelitian ini dilihat dari sub fokus penelitian adalah aspek faktor penyebab rendahnya partisipasi mahasiswa terhadap pelaksanaan pemira FKIP tahun 2020.

C. Subjek Penelitian

Dalam mendukung proses penelitian ini maka diperlukan subjek penelitian itu sendiri, dalam hal ini subjek penelitian ini adalah mahasiswa aktif FKIP yang terdata pada tahun 2020.

D. Tempat Penelitian

Wilayah yang akan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini adalah lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

E. Waktu Penelitian

Waktu dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya Surat Izin Penelitian Pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada 23 Mei 2022 dengan nomor surat **2407/UN26.13/PN.01.00/2022** dan selesai pada tanggal 31 Mei 2022.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Deskripsi Teori

Deskripsi teori berisi uraian teori yang menjelaskan terkait variabel yang akan diteliti, dengan cara menjelaskan tiap poin dari variabel yang diteliti dengan pemberian definisi secara lengkap dari berbagai sumber referensi yang aktual sehingga dapat memperkuat penelitian.

A. Tinjauan Umum Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikut sertaan. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses kehidupan bernegara baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil dari proses bernegara tersebut.

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Menurut Sundari Ningrum (2011) dalam Sugiyah mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

a. Partisipasi langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah

dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Totok Mardikanto (2012) adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Masih menurut Totok Mardikanto dalam kamus Sosiologi Bomby mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan untuk memperoleh manfaat, menurut kamus sosiologi tersebut bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Keith Davis mengemukakan jenis-jenis partisipasi adalah sebagai berikut:

- a) Partisipasi dengan pikiran (*psychological participation*)
- b) Partisipasi dengan tenaga (*physical participation*)
- c) Partisipasi dengan pikiran dan tenaga (*active participation*)
- d) Partisipasi dengan keahlian (*with skill participation*)
- e) Partisipasi dengan barang (*material participation*)
- f) Partisipasi dengan uang (*money participation*)
- g) Partisipasi dengan jasa (*services participation*)

Menurut Totok Mardikanto, munculnya paradigma pembangunan yang partisipatif mengidentifikasi adanya beberapa perspektif yaitu:

- a. Pelibatan masyarakat setempat (masyarakat miskin, perempuan) dalam sosialisasi, perencanaan;
- b. Pelibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program atau proyek yang mewarnai hidup mereka;
- c. Melibatkan masyarakat setempat dalam pengendalian, pelestarian agar program atau proyek dapat dikendalikan atau *sustainable*.

Dusseldorp membedakan partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaannya, sebagai berikut:

- a. Partisipasi spontan, yaitu partisipasi yang terbentuk secara spontan dan tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, atau keyakinannya sendiri, tanpa adanya pengaruh yang diterimanya dari penyuluhan atau bujukan yang dilakukan oleh pihak lain (baik individu maupun lembaga masyarakat).
- b. Partisipasi terinduksi, yaitu partisipasi yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan, penyuluhan) dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi. Motivasi ekstrinsik tersebut bisa berasal dari pemerintah, lembaga masyarakat, maupun lembaga sosial setempat atau individu.
- c. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu partisipasi yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya.
- d. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi, yaitu partisipasi yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.

- e. Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu partisipasi yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.

Berdasarkan hasil penelitian Goldsmith dan Blustain di Jamaica, bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Manfaat yang diperoleh dari partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Mubyarto mengartikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan diri sendiri. Dengan demikian sudah jelas bahwa inti dari partisipasi rakyat adalah sikap sukarela rakyat untuk membantu keberhasilan program pembangunan, dan bukannya sebuah proses mobilisasi rakyat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan individu atau masyarakat baik secara fisik, material maupun non fisik untuk mengambil bagian dalam sebuah kegiatan atau perkumpulan baik secara bebas sukarela, spontan dengan pemahaman sendiri, maupun karena terinduksi oleh bujukan dan arahan dari pihak lain, dengan usaha-usaha ke arah pencapaian tujuan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Partisipasi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Pangestu (2015) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, taraf kesehatan, jumlah pendapatan dan pengalaman hidup berkelompok atau berorganisasi.
- b. Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola kegiatan dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu kegiatan tersebut, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka.

Angell (2012) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi yaitu: yang pertama usia, orang dengan usia menengah keatas cenderung lebih banyak berpartisipasi dari pada kelompok usia lain. Kedua jenis kelamin, kebiasaan dalam bangsa kita peranan perempuan hanya mengurus rumah tangga sehingga hal ini mengakibatkan lelaki lebih banyak memiliki waktu berpartisipasi dalam setiap program. Ketiga pendidikan, pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi. Keempat pekerjaan dan penghasilan, pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup dapat mendorong untuk berpartisipasi. Kelima, lamanya seseorang tinggal serta lamanya seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat partisipasinya.

Fatmariza (2021) menyatakan faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang terdiri atas 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal meliputi faktor kesadaran politik dan faktor kepercayaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi

sumberdaya sosial, sosialisasi, kinerja tim sukses dan popularitas calon aktor.

B. Tinjauan Umum Partisipasi Mahasiswa di Perguruan Tinggi

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat 15 Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Pada umumnya perguruan tinggi berbentuk akademik, institut, sekolah tinggi, universitas dan lain-lain. Sebuah universitas atau perguruan tinggi dapat menyelenggarakan proses akademik dengan program Diploma (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3) dan Spesialis. Sedangkan pada penjabaran sebelumnya yang dimaksud dengan partisipasi adalah keterlibatan individu atau kelompok masyarakat baik secara fisik, material maupun non fisik untuk mengambil bagian dalam sebuah kegiatan atau perkumpulan baik secara bebas sukarela, spontan dengan pemahaman sendiri, maupun karena terinduksi oleh bujukan dan arahan dari pihak lain, dengan usaha-usaha ke arah pencapaian tujuan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa partisipasi mahasiswa di perguruan tinggi adalah keterlibatan mahasiswa baik sebagai individu maupun kelompok secara fisik ataupun non fisik untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang dilaksanakan pada wadah perguruan tinggi. Dalam perguruan tinggi tersebut seorang mahasiswa memiliki 3 aspek partisipasi yang dipertanggung jawabkan sebagai identitas dirinya. Ketiga aspek tersebut antara lain yaitu;

1. Aspek Akademik

Kata akademik berasal dari bahasa Yunani yakni *academos* yang berarti sebuah taman umum (plasa) di sebelah barat laut kota Athena. Kemudian kata *academos* berubah menjadi akademik, yaitu semacam tempat perguruan. Pada umumnya pengertian akademik adalah keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan sekaligus dapat mengujinya secara jujur, terbuka, dan leluasa. Menurut Khairat dan Adiyanti (2015) akademik merupakan penguasaan materi studi yang meliputi aspek kognitif, efektif dan psikomotor. Ranah kognitif adalah ranah yang

mencakup kegiatan mental (otak), Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai, dan Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan (*skill*) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. (Nurbudiyani, 2013) dalam aspek akademik ini, tugas mahasiswa hanya satu, yaitu mahasiswa dituntut untuk belajar dan belajar dalam lingkungan kampus. Karena pada dasarnya proses pembelajaran di kampus merupakan suatu hal yang harus diikuti oleh mahasiswa agar dapat terjadi proses transaksi gagasan antara staf pengajar dengan mahasiswa itu sendiri.

2. Aspek Organisatoris

Menurut Rivai dan Mulyadi (2013) organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu-individu secara sendiri-sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai suatu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran. Adapun bentuk organisasi intra kampus adalah organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk mengurus wilayah kemahasiswaan dalam bidang legislatif dan eksekutif. Organisasi intra kampus ini meliputi: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/P) dan lainnya.

Mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin dimasa mendatang diharapkan memiliki daya nalar dan analisis tinggi dan tujuan, serta memiliki keterampilan khusus. Pada masa perkuliahan saat yang paling tepat untuk membentuk diri sekaligus menggali potensi yang mereka miliki, dengan mengikuti organisasi-organisasi yang ada di dalam lingkungan fakultas maupun universitas, sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 14 ayat 1 yang berbunyi “Mahasiswa mengembangkan bakat,

minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan”, sedangkan pada ayat 2 berbunyi “Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan”. Dari aspek organisasi ini, mahasiswa dituntut untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya di berbagai organisasi intra kampus maupun organisasi ekstra kampus selain apa yang didapatkan pada aspek yang pertama. Sehingga kemampuan intelektual dalam diri mahasiswa terus terasah. Proses pengembangan intelektual dalam aspek organisatoris ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa, karena perlu disadari salah satu substansial dari pendidikan adalah memperkaya kecerdasan intelektual.

Politik kampus merupakan dinamika-dinamika yang terjadi di perguruan tinggi yang bisa melibatkan organisasi mahasiswa, dosen maupun pihak-pihak yang ada di perguruan tinggi. Organisasi mahasiswa seperti yang dimaksud pada Undang-undang No 12 Tahun 2012 pasal 66 pada paragraf 3 adalah:

- a. Mahasiswa dapat membentuk organisasi mahasiswa
- b. Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:
 - 1) Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat dan potensi mahasiswa.
 - 2) Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan serta rasa kebangsaan.
 - 3) Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa
 - 4) Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian masyarakat.
- c. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra perguruan tinggi.
- d. Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi mahasiswa.

3. Aspek Sosial Politik

Dalam aspek sosial politik ini, mahasiswa dituntut untuk melakukan pengkajian-pengkajian yang merupakan pengaplikasian dari aspek pertama dan aspek kedua. Mahasiswa juga dituntut untuk melakukan pengkajian mengenai duduk permasalahan bangsa yang kemudian dapat ditransformasikan kepada masyarakat luas serta dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tertindas. Karena pada umumnya mahasiswa dipandang sebagai barisan terdepan masyarakat yang memiliki berbagai macam gelar seperti *agent of change*, *agent of social control*.

Mahasiswa dengan berbagai peran sosialnya dapat melakukan aktivitas-aktivitas sosial politik. aktivitas tersebut dapat dilihat pada fenomena pemerintahan mahasiswa sebagai wujud dari politik yang ada di kampus. Fokus politik kampus merupakan segala kebijakan yang digulirkan oleh lembaga mahasiswa itu sendiri (internal) atau oleh birokrasi kampus, seperti jurusan, fakultas atau universitas (eksternal). Politik kampus dalam konteks internal dapat dilihat pada pemerintahan mahasiswa. Pemerintahan mahasiswa lahir dari kebutuhan mahasiswa untuk mengaspirasikan, menyalurkan dan menuntut hak-hak politik. Basis keberadaan pemerintahan mahasiswa adalah mahasiswa secara keseluruhan, sehingga partisipasi mahasiswa dalam politik kampus menjadi paling utama.

Politik kampus merupakan bagian dari upaya penanaman nilai-nilai pendidikan politik yang dimulai di perguruan tinggi. Menurut Gabriel Almond dalam Muchtar Mas' oed (2016) pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing individu berpartisipasi dalam sistem politiknya. Mohammad Nuh sebagaimana dikutip oleh Wayan Sohib (2009) mengatakan, pendidikan politik tidak terbatas pada pengenalan seseorang terhadap peran individu dalam partisipasinya di pemerintahan, partai politik

dan birokrasi. Tetapi pada hakikatnya adalah terbangunnya proses pendewasaan dan pencerdasan seseorang akan tanggung jawab individu dan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sesuai otoritasnya yang mengandung makna mentalitas dan etika dalam berpolitik.

Pelaksanaan politik kampus selain sebagai upaya pendidikan politik bagi mahasiswa juga merupakan wujud pendidikan dan penerapan demokrasi yang ditanamkan dalam perguruan tinggi. Upaya penanaman nilai-nilai demokrasi di kampus ini secara konvensional dilaksanakan salah satunya melalui proses yang dinamakan Pemilihan Raya Mahasiswa (pemira). Begitupun di Universitas Lampung, menurut Undang-undang Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemira pada Pasal 1 Ayat 1 dikatakan bahwa Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Lampung selanjutnya disebut Pemira adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam KBM Unila. Pemira merupakan sebuah proses pendidikan dan penanaman nilai-nilai demokrasi di perguruan tinggi untuk memilih pemimpin organisasi kemahasiswaan dalam lingkup lembaga legislatif maupun eksekutif yang diselenggarakan oleh panitia khusus penyelenggara pemira (pansus pemira) atau dalam tataran negara lazim disebut KPU. Di Universitas Lampung sendiri mekanisme dan tahapan penyelenggaraan pemira lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemira.

Dinamika kehidupan kampus akan tercipta apabila ketiga aspek partisipasi mahasiswa tersebut benar-benar disadari sebagai identitas atau jati diri bagi mahasiswa, sehingga institusi yang ada dalam lingkungan kampus dapat bersinergi yang nantinya akan menghasilkan kampus yang dinamis, demokratis dan memiliki kesadaran politik yang tinggi.

C. Tinjauan Umum Partisipasi dan Kesadaran Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi politik berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara (Suharno, 2004).

Partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara pada wujud keikutsertaan warga negara dalam rangka pengambilan keputusan untuk mempengaruhi sebuah keputusan politik. Bentuk pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh warga negara bukan seorang politisi atau pegawai negeri maupun partai politik yang berkuasa, partisipasi politik dilakukan oleh warga negara yang terlibat dalam suatu pengambilan keputusan, baik dari segi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau dalam pemberian suara dalam pemilu. Hal itu dilakukan agar terciptanya sebuah tatanan negara demokrasi yang di idam-idamkan oleh sebuah negara. Seperti yang diutarakan oleh Faulks (2010) partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Dari pendapat tersebut menjelaskan, bahwa pada dasarnya partisipasi merupakan keikutsertaan warga masyarakat dalam rangka menentukan atau mempengaruhi sebuah keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah guna kepentingan hidupnya dalam konteks masyarakat. Pada dasarnya, partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Keterlibatan warga

tersebut merupakan gambaran bahwa warga negara memiliki perhatian terhadap berbagai persoalan dalam bidang politik yang sedang berlangsung di dalam sebuah negara. Menurut Afrilia dkk (2017) bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin atau penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional maupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*).

Sedangkan Budiardjo (2008) menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin dalam negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan politik baik disadari ataupun tidak guna untuk mempengaruhi proses-proses politik dalam menentukan pengambilan kebijakan pemerintah. Sehingga jika dikaitkan dengan bentuk partisipasi mahasiswa di kampus maka dari definisi tersebut dapat ditarik beberapa kriteria dari pengertian partisipasi politik yaitu (a) Menyangkut kegiatan-kegiatan politik mahasiswa yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi, partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat objektif dan bukan subjektif. (b) Kegiatan politik mahasiswa yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (perantara). (c)

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan bahkan penolakan terhadap keberadaan figur para pelaku politik baik didalam maupun diluar jajaran kemahasiswaan dan yang terakhir partisipasi politik adalah kegiatan mahasiswa atau sekelompok mahasiswa untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin politik di kemahasiswaan atau upaya mempengaruhi kebijakan politik kampus.

Negara demokrasi pada umumnya menganggap bahwa semakin banyak partisipasi masyarakat, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Partisipasi dalam konteks ini merupakan keikutsertaan atau keterlibatan mahasiswa dalam agenda-agenda politik, seperti pemilihan raya mahasiswa (pemira), penandatanganan petisi, audiensi dengan birokrasi kampus, menghadiri kongres atau musyawarah mahasiswa (musma), aksi massa dan sebagainya yang bertujuan untuk merealisasikan hak-hak politik mahasiswa. Mahasiswa merupakan komponen penting dalam membangun sistem demokrasi dalam politik Indonesia. Karena itu peran politik mahasiswa sangatlah diharapkan, dimana dalam dinamika politik negara, kekuatan mahasiswa terletak pada independensinya dan daya kritisnya. Sebagai golongan ataupun kelompok pembaharu, peran mahasiswa sangat penting dibutuhkan. Untuk mengarahkan pembaharuan kearah yang dicita-citakan oleh kemerdekaan bangsa kita, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aturan ini, bersumber dari Undang-undang Pilkada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Peraturan yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2015 tentang pilkada secara jelas menyebutkan hak mahasiswa dalam memilih, serta tata aturan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Secara umum, hak memilih telah diatur dalam Bab X: Hak Memilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Di bagian pertama tentang Hak Memilih pasal 56 ayat 1 yang berbunyi disebutkan bahwa warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah, mempunyai hak memilih. Warga negara Indonesia yang dimaksud ini hanya didaftar 1 (satu kali) oleh penyelenggara. Jika pemilih mempunyai lebih dari satu tempat tinggal, ia harus memilih tempat pemilihannya untuk dicantumkan dalam daftar pemilih. Hal tersebut berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau berupa surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah.

2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Pada umumnya partisipasi politik dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan ataupun kesadaran dan kepercayaan seseorang terhadap sistem politik yang ada di lingkungannya. Dari sini akan ditentukan pula berbagai tipe atau bentuk partisipasi masyarakat. Rahman (2007) bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non-konvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Perhatikan tabel berikut tentang bentuk-bentuk partisipasi politik.

Tabel 2.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non-Konvensional
Pemberian suara (voting)	Pengajuan petisi
Diskusi politik	Berdemonstrasi
Kegiatan kampanye	Konfrontasi
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Mogok
Komunikasi individual dengan pejabat	Tindak kekerasan politik harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran)
Politik dan administrative	Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)
	Perang gerilya dan revolusi

Setiadi dan Kolip (2013) mengemukakan bahwa partisipasi politik dapat dibagi menjadi lima bentuk, yaitu: (a) Kegiatan yang berkenaan dengan pemilihan umum (b) *Lobbying* (c) Kegiatan organisasi politik (d) Kontak dengan pejabat pemerintah pembuat dan pelaksana keputusan (e) Mempengaruhi proses politik dengan kekerasan. Adapun uraiannya sebagai berikut:

a) Kegiatan yang berkenaan dengan pemilihan umum.

Kegiatan yang termasuk dalam kategori bentuk pertama (pemilihan umum) antara lain menjadi calon dalam pemilihan umum, memberi sumbangan untuk dana kampanye partai atau calon tertentu, bekerja pada salah satu unit kegiatan dalam proses pemilihan umum, dan menjadi pendukung setia dan fanatik partai politik satu calon tertentu (memasang tanda gambar partai dan calon tertentu dalam mobil atau rumah sendiri).

b) *Lobbying*.

Kegiatan *lobbying* adalah kegiatan individu atau kelompok untuk mempengaruhi secara langsung (tatap muka) dengan pejabat

pemerintah atau pemimpin politik tertentu dalam rangka mendukung atau menentang suatu rancangan keputusan pemerintah tertentu. Perlu ditekankan disini bahwa pengertian *lobbying* di Amerika sebagai asal konsep ini.

c) Kegiatan organisasi politik.

Keanggotaan seseorang dalam suatu partai politik tertentu secara aktif atau menjadi pengurus suatu organisasi partai politik merupakan bentuk partisipasi politik yang ketiga. Mengapa menjadi anggota aktif atau menjadi pengurus partai politik dikategorikan sebagai partisipasi politik? Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa fungsi partai politik selalu berkaitan dengan pemerintah dan proses politik pada umumnya, yaitu memudahkan berbagai kepentingan dalam masyarakat kedalam berbagai alternatif kebijaksanaan umum untuk kemudian diperjuangkan kepada pembuat keputusan, dan mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui proses pemilihan umum dan cara politik lain yang dianggap tepat. Oleh karena itu, menjadi anggota aktif atau menjadi pengurus suatu partai politik akan dengan sendirinya terlibat dalam kedua atau salah satu dari fungsi tersebut.

d) Kontak dengan pejabat pemerintah pembuat dan pelaksana keputusan.

Bentuk partisipasi politik yang keempat adalah mengadakan kontak dengan pejabat pemerintah atau pemimpin politik untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau kelompoknya. Yang mengadakan kontak ini biasanya seorang individu aktor politik, misalnya dengan mengirim surat kepada pejabat pemerintah yang berwenang atas hal yang dituntut atau yang diperlakukannya. Kontak ini dapat dilakukan secara langsung dalam artian mengirim surat secara langsung kepada pejabat yang bersangkutan, akan tetapi dapat pula dilakukan secara tidak langsung dalam artian melalui surat kabar. Sehubungan dengan itu, kegiatan seorang individu aktor politik untuk mengirimkan surat pembaca kepada

surat kabar tertentu yang isinya bersangkutan paut dengan pembuatan dan pelaksanaan (serta pengawasan) surat kebijaksanaan umum oleh pemerintah dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik bentuk kontak ini.

e) Mempengaruhi proses politik dengan kekerasan.

Bentuk partisipasi politik yang bersifat kekerasan. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa ada sementara sarjana yang tidak mengkategorikan kegiatan politik bersifat kekerasan sebagai bentuk partisipasi politik. Bagi penulis segala kegiatan politik dikalangan masyarakat (bukan dari pemerintah dalam artinya yang umum) apakah itu bersifat kekerasan atau bukan dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik. Kegiatan politik yang bersifat kekerasan ini secara umum dapat dibagi menjadi tiga: (1) kegiatan politik yang bertujuan mengubah atau mengganti pimpinan politik/pemerintahan yang ada, seperti kegiatan politik kudeta atau pembunuhan politik (*political assassination*); (2) kegiatan politik yang bertujuan mengubah kebijaksanaan umum yang ada, seperti protes, hura-hura, demonstrasi, dan pemberontakan; (3) kegiatan politik yang bertujuan mengganti seluruh sistem politik yang ada, seperti revolusi. Jadi baik kudeta, pembunuhan politik, demonstrasi protes, hura-hura, pemberontakan maupun revolusi apakah berhasil atau tidak berhasil pun semuanya itu dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik.

Arifin (2014) mengemukakan bahwa semua warga negara secara individu yang bukan politikus atau bukan pemimpin politik yang melakukan partisipasi politik disebut sebagai partisipan politik, yaitu pengikut politik alternatif atau yang berminat dan ikut dalam kegiatan politik. Selain itu terdapat juga pengikut politik yang acuh tak acuh. Baik partisipan politik sebagai peserta politik yang atentif maupun peserta politik yang acuh tak acuh merupakan khalayak politik dalam perspektif komunikasi politik yang memiliki peran penting dalam mendorong timbulnya partisipasi politik. Meskipun partisipasi politik

terwujud dalam berbagai bentuk, pemberian suara dalam kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik yang sering dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh Rush dan Althoff (2011) kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana. Lagi pula, tanpa melihat pembatasan-pembatasan lainnya, kegiatan pemberian suara itu tidak boleh dibatasi oleh seringnya pemilihan.

3. Jenis Partisipasi Politik

Berdasarkan pengertian partisipasi politik dalam sub-bab sebelumnya, jenis partisipasi politik dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Partisipasi berdasarkan kegiatan.

Surbakti (2010) mengatakan partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Disamping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk kedalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan, kelompok ini disebut apatis atau golongan putih. Menurut Setiadi & Kolip (2013) partisipasi aktif adalah kegiatan yang sifatnya “mempengaruhi” proses input politik seperti mengajukan petisi, demonstrasi, kontak dengan pejabat pemerintah, anggota aktif, atau pengurus partai politik dan mengajukan alternatif keputusan politik yang berlainan dengan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan partisipasi politik pasif merupakan tindakan “melaksanakan” output politik, seperti menaati hukum, membayar pajak, dan memelihara ketertiban dan keamanan.

b. Partisipasi berdasarkan jumlah pelaku.

Surbakti (2010) Partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. Maksudnya, seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah atau kolektif. Yang dimaksud partisipasi secara kolektif ialah kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam pemilihan umum. Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi politik konvensional seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi kolektif yang tidak konvensional (agresif), seperti pemogokan yang tidak sah, menguasai bangunan umum, dan huru-hara. Lalu partisipasi politik kolektif secara agresif dibedakan menjadi dua, yaitu aksi yang kuat dan aksi yang lemah. Aksi yang kuat dan lemah tidak menunjukkan sifat yang baik atau buruk. Dalam hal ini, kegiatan politik dapat dikategorikan kuat apabila memenuhi tiga kondisi sebagai berikut: bersifat anti rezim dalam arti melanggar peraturan mengenai partisipasi politik yang normal (melanggar hukum), mampu mengganggu fungsi pemerintahan, dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan non-elite. Fungsi pemilihan raya mahasiswa selain untuk memilih ketua sebuah organisasi mahasiswa juga berfungsi sebagai media partisipasi mahasiswa pada sistem politik kampus.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi yang dilakukan oleh seseorang dalam konteks kegiatan politik tidak semata-mata dilakukan dengan tanpa alasan, tetapi dilatarbelakangi oleh suatu tujuan tertentu yang dapat merubah struktur politik di pemerintahan dengan maksud agar pemerintahan dapat memperhatikan segala keinginan rakyatnya. Hasanuddin dkk (2015) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang. Pertama, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban

sebagai warga negara. Kedua, menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik di hidup. Yang dimaksud dengan sikap kepercayaan kepada pemerintah adalah penelitian seseorang terhadap pemerintah.

Menurut Rahman (2007), ada lima faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu: modernisasi, perubahan struktur strata sosial, pengaruh intelektual, konflik dan intervensi yang kuat dan luas.

Penjelasan dari lima penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Modernisasi, kemajuan dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
- b. Perubahan-perubahan struktur sosial, masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
- d. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elit maka yang dicari adalah dukungan rakyat, terjadi perjuangan kelas menengah melawan kaum aristokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan, meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami pada dasarnya seseorang dalam melakukan partisipasi politik memiliki faktor dan tujuan yang

beragam dari tiap individu atau kelompok sosialnya. Identifikasi mereka terhadap nilai-nilai politik serta faktor yang bersifat ekologis yang dianut, menyebabkan seseorang atau kelompok itu mampu mengambil keputusan dalam politik.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang yaitu pendidikan politik. Pendidikan politik dalam suatu bangsa sangatlah penting, karena dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang luas terhadap nilai-nilai dasar yang dimiliki sebuah bangsa, manfaat dari semua itu ialah menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan wawasan dan terlebih masyarakat akan mengetahui kesadaran mengenai permasalahan yang terjadi di dalam politik. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik menyebabkan mereka menjadi pasif dan sangat mudah untuk dimobilisasi oleh para elit politik guna kepentingan pribadi mereka. Kusmanto (2013) mengatakan mereka yang berpendidikan yang lebih tinggi, berpenghasilan yang lebih besar mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih berpartisipasi daripada mereka yang miskin, tidak berpendidikan dan memiliki pekerjaan dan status rendah.

5. Indikator Partisipasi Politik

Menurut Rush dan Althoff (2011) menyatakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi politik adalah sebagai berikut:

a. berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik, b. memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi.

a. Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik.

Keikutsertaan individu dalam kegiatan-kegiatan politik baik secara langsung ataupun tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan umum.

b. Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi.

Partisipasi seseorang dalam kegiatan politik memiliki beberapa tingkatan-tingkatan partisipasi: 1. sebagai aktivis politik yaitu seseorang individu yang menjadi pejabat partai dan dengan

sepanjang waktu memimpin partai atau kelompok kepentingan 2. partisipan yaitu individu yang berperan sebagai petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partai atau kelompok kepentingan dan aktif dalam proyek-proyek sosial 3. sebagai pengamat yaitu individu yang selalu menghadiri rapat umum, menjadi anggota aktif dari partai atau kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, selalu mengikuti perkembangan politik melalui media massa dan memberikan suara dalam pemilihan umum 4. orang apolitis yaitu orang yang tidak ikut dalam pemilihan umum dan bersikap acuh tak acuh terhadap dunia politik.

Berdasarkan beberapa uraian mengenai partisipasi politik di atas maka dapat disintesis bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalam berbagai kegiatan politik baik disadari ataupun tidak guna untuk mempengaruhi proses-proses politik. Dalam konteks kampus, proses pemilihan anggota DPM FKIP dan Gubernur Mahasiswa BEM FKIP merupakan simulasi dalam penerapan partisipasi politik mahasiswa. Adapun indikator yang terdapat dalam partisipasi politik tersebut adalah: (1) berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik: a. kegiatan-kegiatan atau aktivitas politik yang diikuti, b. keikutsertaan dan partisipasi dalam kegiatan politik, (2) tingkatan-tingkatan seseorang dalam berpartisipasi: a. sebagai aktivis politik, b. sebagai partisipan politik, c. sebagai pengamat politik, d. sebagai apolitis.

6. Pengertian Kesadaran Politik

Kesadaran merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian). Sadar akan perbuatan, sadar artinya merasa, tau atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan akan ingat kepada dirinya, ingat kembali (dari pingsannya), siuman, bangun (dari tidur) ingat, tau dan mengerti

misalnya, rakyat telah sadar akan politik. Surbakti (2010) menyatakan bahwa kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Kesadaran politik sangat berhubungan erat dengan partisipasi politik. partisipasi politik tanpa kesadaran politik itu bisa saja terjadi seperti halnya pemilih yang hanya sekedar menggunakan hak pilihnya, namun sebenarnya ia hanya asal memilih. Sebaliknya, partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi pemilih. Seperti yang dikemukakan Hidayat (2016) kesadaran politik adalah suatu keadaan dimana seseorang sadar, mengerti, dan tau akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Fatwa (2016) mengatakan bahwa kesadaran politik merupakan kondisi tanggap mengerti tentang hal yang mencakup wawasan/ pengetahuan politik, nilai-nilai dan orientasi politik yang memungkinkan seseorang untuk mengerti situasi, kondisi problematika masyarakatnya, memecahkannya, memberikan keputusan dan menentukan pendirian terhadapnya, yang mendorongnya untuk bergerak dalam rangka merubah atau mengembangkannya.

Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik adalah pengetahuan seseorang dan mengerti secara sadar akan semua hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara.

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran Politik

Ada dua faktor terpenting yang dapat meningkatkan kesadaran warga negara. Pertama, meningkatkan capaian pendidikan, khususnya bertambahnya jumlah orang yang berpendidikan tinggi. Kedua, lebih banyak tersedianya informasi yang dipasok oleh media massa,

khususnya televisi (Faulks, 2010). Tingkatan capaian pendidikan seseorang dapat mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan termasuk dalam kesadaran politik. Dengan adanya tingkat capaian pendidikan tinggi, masyarakat akan dapat mengembangkan pola pikir dalam menentukan sikap dan pilihannya dalam kehidupan politik. Sedangkan, media massa menjadi salah satu alat politik yang secara tidak langsung memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran politik dalam masyarakat. Berbagai macam informasi politik dapat diperoleh melalui media massa dan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dalam menentukan partisipasi politiknya.

Ruslan (2000) mengatakan kesadaran politik dapat dipengaruhi banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi kesadaran politik yang terpenting di antaranya adalah:

- a. Jenis kultur politik di mana individu itu tumbuh darinya atau dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya.
- b. Berbagai revolusi dan perubahan budaya yang terjadi di masyarakat
- c. Berbagai kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki individu, juga tingkat pendidikannya
- d. Adanya pemimpin politik/ sejumlah tokoh politik yang mampu memberikan arahan politik kepada masyarakat luas.

8. Indikator Kesadaran Politik

Menurut Surbakti (2010) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesadaran politik adalah a. pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, b. minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup, c. sikap dan kepercayaan kepada pemerintah.

- a. Pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik. Yaitu pengetahuan dan pemahaman seseorang yang berkenaan dengan macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik, yang meliputi pengetahuan tentang tujuan negara, lembaga-lembaga negara.

b. Minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

Seseorang yang senang serta antusias dalam mengikuti atau menanggapi berbagai hal yang berkaitan dengan politik yang ada dalam lingkungan masyarakat dimana dia tinggal.

c. Sikap dan kepercayaan kepada pemerintah.

Sikap dan kepercayaan kepada pemerintah yaitu penilaian seseorang individu terhadap pemerintah.

Dari beberapa uraian mengenai kesadaran politik dapat disintesis bahwa kesadaran politik adalah pengetahuan seseorang dan mengerti secara sadar akan semua hak dan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa. Kesadaran politik dalam penelitian ini adalah kesadaran politik mahasiswa FKIP Universitas Lampung. Adapun indikator yang terdapat dalam kesadaran politik tersebut adalah (a) pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik: 1. pemahaman seseorang tentang lingkungan dan politik, 2. dampak dan pengaplikasian pengetahuan politik seseorang dalam lingkungan masyarakat, (b) minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup: 1. senang mengikuti perkembangan politik yang terjadi, 2. bersemangat dan antusias dalam menanggapi informasi politik, (c) sikap dan kepercayaan kepada pemerintah: 1. bentuk sikap kepercayaan kepada pemerintah, 2. mendukung program-program yang dibuat oleh pemerintah.

D. Tinjauan Umum Lembaga Kemahasiswaan di FKIP Universitas Lampung

Perguruan tinggi adalah wadah pengelolaan sumber daya manusia yang memiliki berbagai tujuan penting dalam melahirkan pemimpin, ilmuwan dan profesional dalam mengemban pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya dan kondisi daerah pada khususnya. Dinamika kampus dengan nuansa akademisi tentunya juga diperlukan sebuah pengetahuan pengembangan kepribadian.

Perguruan tinggi yang ketika dilihat komponen kemahasiswaan maka kita akan menjumpai beberapa lembaga kemahasiswaan. Lembaga eksekutif mahasiswa yang disebut dengan BEM (badan eksekutif mahasiswa) juga akan terus mengalami perputaran generasi dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan keluarga besar mahasiswa Universitas Lampung (KBM-Unila). Selain lembaga eksekutif, kampus juga memiliki lembaga legislatif yang akan memainkan fungsi legislasinya dalam penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap kepentingan di perguruan tinggi. Lembaga ini lazim disebut Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) baik pada tingkatan Universitas maupun pada tingkatan Fakultas. Selain memiliki BEM dan DPM pada lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung juga memiliki beberapa Lembaga Kemahasiswaan/Ormawa seperti UKM-F KSS (seni), UKM-F FPPI (kerohanian), UKM-F Racana (pramuka). Selain memiliki beberapa UKM, FKIP Unila juga memiliki 4 (empat) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yaitu; Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Himapis), Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pendidikan (Himajip), Himpunan Mahasiswa Pendidikan Eksakta (Himasakta), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni (HMJPBS). Dari ke-4 (empat) jurusan ini, masing-masing memiliki beberapa program studi yang pada setiap program studi memiliki forum komunikasi mahasiswa prodi (forkom prodi). Secara keseluruhan terdapat 19 forum komunikasi mahasiswa program studi (forkom prodi) di FKIP Universitas Lampung.

Dua lembaga kemahasiswaan penting dan terbesar di FKIP Universitas Lampung yakni BEM dan DPM dalam setiap satu tahun akan mengalami pergantian kepengurusan dan kepemimpinan. Mekanisme yang telah diatur dalam peraturan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang kemudian diturunkan dalam peraturan mahasiswa fakultas (PMF) yaitu dalam pelaksanaan Pemilihan Raya Mahasiswa (pemira) yang

diselenggarakan oleh Panitia Khusus Pemira (Pansus Pemira FKIP) menjadi sangat penting dilaksanakan guna menjamin dan mengakomodir berjalannya demokrasi di kampus. Selain kondisi ini, pemilihan umum raya mahasiswa juga berfungsi sebagai pendidikan politik dan pembelajaran bagi mahasiswa terhadap sistem pemilihan yang dianut negara kita yaitu pemilu. Perguruan tinggi yang menjadi miniatur sebuah negara akan memberikan sebuah pendidikan pengembangan bagi calon-calon pemimpin bangsa masa depan.

2.2 Kajian Penelitian Relevan

Penelitian ini berjudul Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik Mahasiswa pada Pelaksanaan Pemilihan Raya Mahasiswa (pemira) FKIP Universitas Lampung Tahun 2020. Penelitian ini bertempat di FKIP Universitas Lampung. Berdasarkan eksplorasi dan observasi, peneliti menemukan beberapa tulisan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Rahmadano Yuriza (2021) dengan judul “Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih (Studi Kasus: Rendahnya Partisipasi Politik Mahasiswa UNP dalam Pemilu BEM UNP pada Tahun 2019)”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan subjek penelitian Mahasiswa aktif UNP pada tahun 2019. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa partisipasi politik dan perilaku memilih mahasiswa UNP pada pemilihan BEM UNP 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional.

Persamaan penelitian ini dengan judul penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama membahas mengenai partisipasi politik mahasiswa dalam pelaksanaan pesta demokrasi mahasiswa. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah jika penelitian sebelumnya lebih menjelaskan terkait partisipasi politik dan perilaku memilih mahasiswa penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih menelaah mengenai faktor penyebab yang mengakibatkan rendahnya

partisipasi mahasiswa pada pemira. Lalu perbedaan selanjutnya adalah subjek penelitiannya. Penelitian sebelumnya mengangkat subjek penelitian Mahasiswa aktif UNP pada tahun 2019, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan subjeknya adalah mahasiswa aktif FKIP Universitas Lampung pada tahun 2020. Namun, penelitian tersebut relevan karena memiliki kesamaan dalam ruang lingkup subjek dan objek penelitian yaitu partisipasi memilih dikalangan Mahasiswa.

- b) Penelitian yang dilakukan Syarif Firmansyah (2020) dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul “Analisis Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA IKIP PGRI Pontianak”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan subjek penelitian mahasiswa IKIP PGRI Pontianak Angkatan 2018/2019, panitia pemilihan umum dan Dewan Perwakilan Mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa angkatan 2018/2019 pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden BEM REMA IKIP PGRI Pontianak secara umum dapat dikategorikan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden BEM REMA IKIP PGRI Pontianak secara umum dapat dikategorikan baik.

Persamaan penelitian ini dengan judul penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama menganalisis partisipasi mahasiswa dalam pelaksanaan pemilihan raya. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah penelitian sebelumnya lebih mengkaji mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan raya mahasiswa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih menjelaskan mengenai faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi penggunaan hak suara mahasiswa dalam pelaksanaan pemilihan raya.

2.3 Kerangka Pikir

Berdasarkan penjelasan pada identifikasi masalah dan landasan teori di atas penelitian ini akan berfokus mencari tahu faktor penyebab rendahnya partisipasi mahasiswa pada pemira sebagai bagian dari pendidikan politik mahasiswa di perguruan tinggi dalam upaya menumbuhkan kesadaran politik. dapat dipahami bahwa salah satu bentuk dari berpartisipasi politik yaitu turut serta memberikan suara dalam pemilihan umum yang sedang berlangsung. Selain itu, bentuk dari partisipasi politik itu dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi politik yang sesuai dengan aturan atau konstitusi yang berlaku (konvensional) dan partisipasi politik yang tidak sesuai dengan konstitusi yang ada (non-konvensional).

Dampak dari pandemi *covid-19* mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk pada keberlangsungan kehidupan mahasiswa di kampus. Salah satunya dalam pelaksanaan kontestasi pemilihan raya mahasiswa (pemira). Pemira yang pada umumnya dilaksanakan dengan tahapan-tahapan secara langsung, dengan kondisi pandemi *covid-19* mengharuskan untuk dilaksanakan secara daring. Mulai dari tahapan penyebaran informasi, pelaksanaan kampanye, sampai pada tahapan pencoblosan dilakukan secara daring (*e-voting*) yang mengharuskan penyesuaian berbagai pihak baik dari panitia penyelenggara, peserta pemira, dan pihak-pihak terkait dalam proses pemilihan raya.

Pada proses penyelenggaraan pemilihan raya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2020 juga menggunakan sistem *e-voting* yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini sebagai bentuk penyesuaian dengan kondisi pandemi *covid-19* yang mengharuskan mengurangi mobilisasi kegiatan secara langsung dan ramai. Sehingga menuntut adanya inovasi, dengan kondisi terbatasnya mobilisasi kegiatan namun pesta demokrasi mahasiswa tetap berjalan. Kemudian muncul sebuah inovasi dimana proses pemilihan raya dilaksanakan secara daring menggunakan sistem *e-voting*.

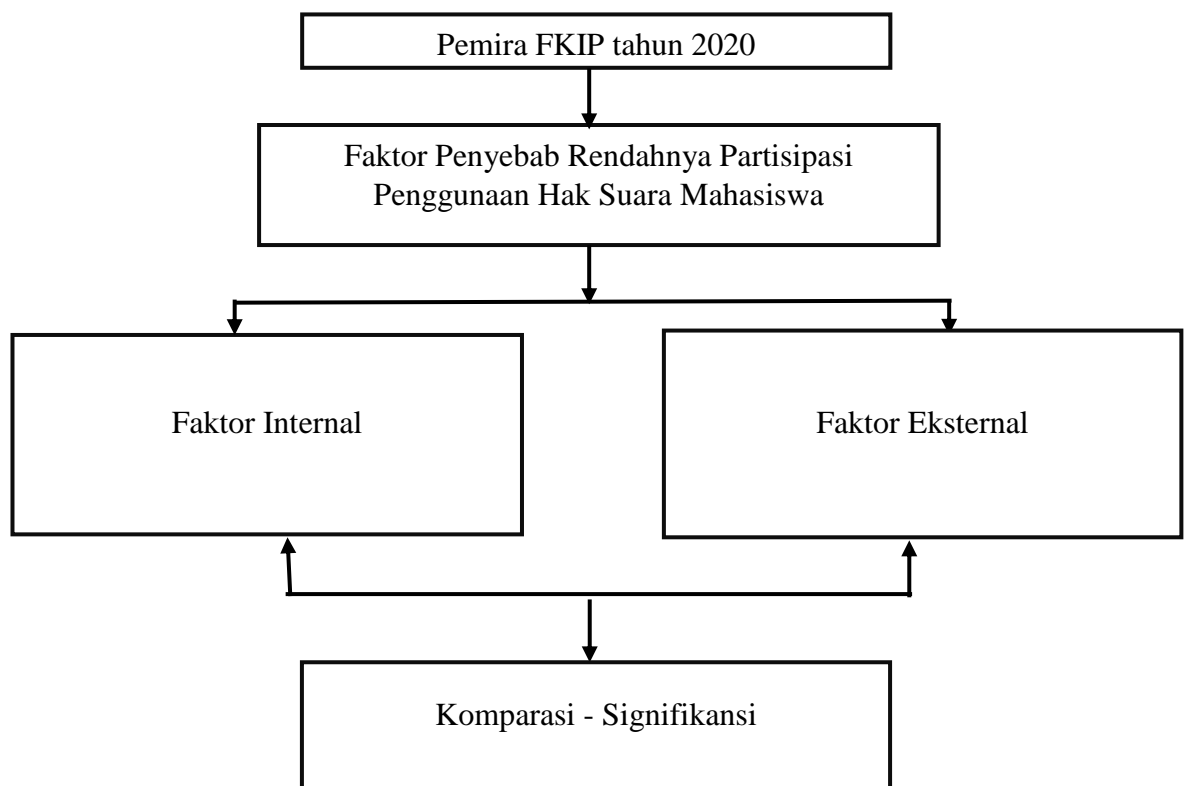
Proses pelaksanaan pemira yang dilaksanakan secara daring tentu memiliki kelebihan, kelemahan dan tantangan tersendiri. Namun di zaman yang begitu pesat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah menjadi keniscayaan untuk dapat memanfaatkan perkembangan IT, termasuk dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi mahasiswa. Pihak penyelenggara pemira dalam hal ini pansus telah bekerja sama dengan pihak UPT-TIK Unila untuk menyiapkan *platform* khusus dalam menunjang pelaksanaan pemira agar bisa berjalan sukses dan terlaksana secara efektif dan efisien. Proses pelaksanaan kampanye dan pemilihan yang dilaksanakan secara daring dinilai dapat memudahkan pemilih untuk mengakses saluran informasi mengenai pelaksanaan pemira dari manapun dan dalam waktu yang lebih fleksibel. Sehingga dengan pelaksanaan pemira secara daring ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik mahasiswa FKIP secara signifikan mengingat proses pelaksanaan lebih efisien.

Namun pada pelaksanaan pemira FKIP tahun 2020 hanya 776 mahasiswa dari total 5.945 mahasiswa FKIP Unila yang menggunakan hak suaranya. Artinya hanya 13,05% mahasiswa FKIP yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pemira FKIP tahun 2020. Hal ini cukup disayangkan, mengingat penjelasan pada landasan teori diatas yang menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mengukur kualitas keberlangsungan suatu demokrasi. Terlebih kampus yang seharusnya menjadi laboratorium pembelajaran bagi para kaum-kaum intelektual sebelum nanti terjun menjadi bagian dari masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi politik mahasiswa terhadap pelaksanaan pemira FKIP tahun 2020. Penulis ingin melakukan penelitian kepada mahasiswa FKIP yang menjadi partisipan pada pemira FKIP tahun 2020 kemudian mengkomparasikan faktor mana yang paling signifikan dalam menyebabkan rendahnya partisipasi mahasiswa tersebut. Dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pelaksanaan

pemira penulis berharap bisa memberikan sumbangsih hasil penelitian kepada pihak-pihak terkait untuk dijadikan pedoman dan evaluasi yang konstruktif sehingga bisa menumbuhkan kesadaran politik dikalangan mahasiswa yang berdampak pada meningkatnya partisipasi mahasiswa dalam pelaksanaan pemira FKIP di masa mendatang. Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) yaitu: “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Sebagaimana penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi mahasiswa FKIP dalam pelaksanaan pemira dan mengetahui faktor apa yang lebih signifikan.

3.2 Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2017). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif pada setiap jurusan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang terdata pada bulan November 2020. Adapun jumlah keseluruhan mahasiswa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa Aktif FKIP per jurusan Tahun 2020

No.	Jurusan	Jumlah Mahasiswa
1.	P. IPS	1.370
2.	IP	1.864
3.	P. MIPA	1.340
4.	PBS	1.371
	Total	5.945

Sumber Data: SK Pansus No. 18 tahun 2020.

B. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Menurut Sugiyono (2017) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili)”. Dalam menentukan ukuran sampel penulis menggunakan rumus Taro Yamane dalam Riduwan (2013) rumus dimaksud adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

d² : presisi atau batas toleransi kesalahan pengambilan sampel.

Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 5.945 mahasiswa dimasukkan ke dalam rumus di atas dengan tingkat presisi yang ditetapkan yaitu 10%. Jadi dijabarkan sebagai berikut:

$$n = \frac{5.945}{N(d^2) + 1} = \frac{5.945}{5.945(0.1^2) + 1} = \frac{5.945}{60,45} = 98,34$$

$n = 98,34$ dibulatkan menjadi 98 mahasiswa

Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 98 mahasiswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Sampel Random* atau sampel acak, sehingga peneliti memberi hak yang sama kepada setiap mahasiswa untuk memperoleh kesempatan (*chance*) dipilih menjadi sampel. Adapun untuk menentukan sampel dari masing- masing bagian digunakan rumus *Stratified Random Sampling* sebagai berikut:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \cdot n$$

Keterangan:

N_i = jumlah populasi secara stratum

n = Jumlah sampel seluruh

n_i = Jumlah sampel menurut stratum

N = Jumlah populasi seluruh

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar Mahasiswa FKIP Per jurusan yang Menjadi Sampel

No.	Jurusan	Jumlah Mahasiswa	Perhitungan Sampel	Jumlah Sampel
1.	P. IPS	1.370	$\frac{1.370}{5.945} \times 98 = 22,58$	22
2.	IP	1.864	$\frac{1.864}{5.945} \times 98 = 30,72$	31
3.	P. MIPA	1.340	$\frac{1.340}{5.945} \times 98 = 22,08$	22
4.	PBS	1.371	$\frac{1.371}{5.945} \times 98 = 22,60$	23
Jumlah		5.945		98

Sumber: Perhitungan oleh penulis

3.3 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) dalam variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya variabel penelitian adalah segala hal yang telah ditentukan peneliti untuk diteliti hingga menghasilkan informasi yang dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Yang menjadi variabel penelitian atau objek penelitian ini merupakan faktor penyebab rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pemira, secara khusus faktor-faktor yang dimaksud bisa dikategorikan pada faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan rendahnya partisipasi mahasiswa pada pemira FKIP tahun 2020.

3.4 Definisi Operasional dan Konseptual

A. Definisi Konseptual

Definisi konseptual variabel digunakan untuk menegaskan tentang masalah yang diteliti. Definisi konseptual variabel adalah penegasan serta penjelasan suatu konsep dengan menggunakan konsep-konsep (kata-kata) lagi, yang tidak harus menunjukkan sisi-sisi (dimensi) pengukuran tanpa menunjukkan deskripsi dan indikatornya dan bagaimana cara mengukurnya.

Partisipasi politik, secara umum partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara pada wujud keikutsertaan warga negara dalam rangka pengambilan keputusan untuk mempengaruhi sebuah keputusan politik. Sebagaimana dikatakan Maran (2007) Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara.

B. Definisi Operasional

Untuk dapat memahami objek permasalahan yang ada di dalam penelitian ini secara jelas, maka diperlukan variabel operasional. Menurut Suryabrata. S (2012) menyatakan bahwa, “definisi operasional merupakan

definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan dan dapat diamati”.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi operasional merupakan variabel yang dapat diamati melalui pengoperasionalan variabel menggunakan proses pengukuran yang tepat. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian/objek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu faktor penyebab rendahnya partisipasi mahasiswa pada pelaksanaan pemira FKIP tahun 2020.

1. Faktor penyebab rendahnya partisipasi mahasiswa pada pemira.
 - a. Faktor Internal
 - 1) Faktor Teknis
 - 2) Faktor Akademis
 - b. Faktor Eksternal
 - 1) Faktor administrasi
 - 2) Faktor Sosialisasi
 - 3) Faktor Sistem
 - 4) Faktor Politik

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka diterapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

A. Angket

Angket merupakan daftar pertanyaan secara tertulis yang terdiri dari item-item pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian dan akan dijawab oleh responden penelitian yaitu mahasiswa FKIP Universitas Lampung pada setiap jurusan yang terpilih secara acak menjadi sampel penelitian. Angket yang akan digunakan adalah angket tertutup dengan item-item pertanyaan/pernyataan disertai alternatif jawaban sehingga membantu responden untuk menjawab dengan cepat, dan juga memudahkan penulis

dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang telah terkumpul. Penelitian ini menggunakan angket bersifat tertutup dengan model skala *likert* dalam bentuk *checklist*, dan telah ditentukan bahwa responden akan menjawab pertanyaan dari tiga alternatif, yaitu: (a), (b), dan (c), yang setiap jawaban diberikan bobot nilai yang bervariasi. Variasi nilai atau skor dari masing-masing jawaban dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Untuk alternatif jawaban setuju diberi nilai atau skor tiga (3).
- b. Untuk alternatif jawaban kurang setuju diberi nilai atau skor dua (2).
- c. Untuk alternatif jawaban tidak setuju diberi nilai atau skor satu (1).

B. Wawancara

Wawancara telah dilakukan oleh penulis dalam rangka melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara telah dilakukan secara acak kepada 5 responden mahasiswa FKIP melalui perantara (media komunikasi) guna efisiensi waktu. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan jika penulis akan melakukan wawancara kembali untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin yang dimana pihak yang mewawancarai yaitu peneliti sudah mempersiapkan dan memiliki daftar pertanyaan secara rinci dan detail mengenai topik yang akan ditanyakan kepada narasumber. Tujuan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk melengkapi serta memperkuat data penelitian yang belum lengkap/belum terjawab melalui angket. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tentu saja berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan untuk mencari tahu apa saja faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi mahasiswa pada pelaksanaan pemira FKIP tahun 2020.

3.6 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

A. Uji Validitas

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) bahwa “sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Maka dapat diketahui bahwa, uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Berdasarkan uraian tersebut uji validitas dapat diartikan sebagai kontrol langsung terhadap teori- teori yang telah melahirkan indikator variabel yang disesuaikan dengan maksud dan isi butir soal yang dilakukan melalui koreksi angket dan konsultasi dengan Pembimbing 1 dan Pembimbing II.

Uji validitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Cara mengukur variabel konstruk yaitu mencari korelasi antara masing- masing pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi *pearson product moment*, menggunakan bantuan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. Langkah-langkah dalam menghitung validitas menggunakan SPSS versi 20 yaitu: (1) Masukkan dengan seluruh data dan skor total; (2) *Analyze >> Correlate >> Bivariate*; (3) Masukkan seluruh item ke dalam kotak *Variabels*; (4) Klik *Pearson >> OK*. Adapun kriteria diterima atau tidaknya suatu data valid atau tidak dalam program SPSS (Priyanto, 2008).

Berdasarkan nilai korelasi :

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dinyatakan valid.
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan signifikansi :

- a. Jika nilai signifikansi $> \alpha (0,05)$ maka item dinyatakan tidak valid.
- b. Jikai nilai signifikansi $< \alpha (0,05)$ maka item dinyatakan valid.

B. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument itu sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2010). Untuk menentukan reliabilitas angket digunakan rumus. Uji reliabilitas dilakukan pada variabel penelitian. Cara mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan bantuan SPSS versi 2.

Menurut Sekaran dalam Wibowo (2012) kriteria penilaian uji reliabilitas jika reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 3.3 Indeks Koefisien Reliabilitas

No	Nilai Interval	Kriteria
1	<0,20	Sangat Rendah
2	0,20 – 0,399	Rendah
3	0,40 – 0,599	Cukup
4	0,60 – 0,799	Tinggi
5	0,80 – 1,00	Sangat Tinggi

Sumber: Wibowo (2012)

Selain itu nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* pada perhitungan SPSS dengan nilai r tabel menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS secara default menggunakan nilai ini) dan $df = N - k$, $df = N - 2$, N adalah banyaknya sampel dan k adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu:

- a. Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/ pernyataan tersebut reliabel.
- b. Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) < r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/ pernyataan tersebut tidak reliabel.

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji reliabilitas dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item pertanyaan/pernyataan, dalam hal ini skor total tidak diikutsertakan.
- b. Melakukan analisis menggunakan perintah *analyze* kemudian *scale reliability analysis*.
- c. Membandingkan nilai *cronbach's alpha* dengan r_{tabel}

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka secara sistematis yang dilakukan setelah semua data terkumpul, yaitu dengan mengidentifikasi data selanjutnya mengolah data tersebut. Adapun dalam penggolongan data tersebut menggunakan rumus interval, yakni:

A. Analisis Distribusi Frekuensi

Analisis distribusi frekuensi dilakukan terhadap hasil pengambilan data dari angket (faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi politik mahasiswa). Analisis distribusi frekuensi dilakukan untuk mengetahui klasifikasi beserta persentase dari faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi politik mahasiswa pada pelaksanaan pemira FKIP tahun 2020. Analisis distribusi frekuensi menggunakan rumus interval sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

- I = Interval
 NT = Nilai tertinggi
 NR = Nilai terendah
 K = Kategori

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Besarnya persentase

F = Jumlah skor yang diperoleh diseluruh item

N = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden

Selanjutnya Arikunto (2019) menyebutkan bahwa untuk mengetahui banyaknya persentase yang diperoleh maka digunakan dengan kriteria yang dapat ditafsirkan sebagai berikut:

76% - 100 % = Baik

56% - 75% = Cukup

40% - 55% = Kurang baik

0% - 39% = Tidak baik

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai faktor penyebab rendahnya partisipasi mahasiswa pada pelaksanaan pemira FKIP Unila tahun 2020, dapat disimpulkan faktor penyebab rendahnya partisipasi mahasiswa terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian dari data yang telah dideskripsikan pada bagian pembahasan, disimpulkan secara signifikansi indikator faktor eksternal lebih signifikan berpengaruh dalam menyebabkan rendahnya partisipasi mahasiswa pada pelaksanaan pemira FKIP Unila tahun 2020 dengan akumulasi persentase 70,39%.

Pemahaman mahasiswa yang kompleks mengenai materi pelajaran PPKn di sekolah maka akan berdampak maksimal pada kesiapan mahasiswa sebagai calon guru sebagaimana sesuai dengan konsep kompetensi seorang guru yang harus dimiliki mahasiswa PPKn. Selain itu, kesadaran untuk berpartisipasi pada kegiatan pemilu raya merupakan kewajiban dasar seorang warga negara sebagaimana pelaksanaan hak dan kewajibannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa FKIP kesadaran politik sangat penting ditanamkan pada diri agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya khususnya partisipasi politik yang diharapkan dapat menjadi kebiasaan baik saat nanti terjun di masyarakat.

Dan perguruan tinggi melalui organisasi kemahasiswaan merupakan fasilitas yang diberikan untuk menjadi sarana penanaman nilai-nilai pendidikan politik dan demokrasi tersebut.

B. Bagi Mahasiswa PPKn

Bagi mahasiswa khususnya program studi PPKn yang disiapkan untuk menjadi seorang pendidik substansi materi mengenai sistem dan dinamika demokrasi yang di dalamnya mempelajari hak dan kewajiban warga negara yaitu berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu merupakan materi pokok yang akan diajarkan, sehingga muatan materi dan bentuk implementasinya di kampus sangat penting untuk diikuti dan dipelajari.

C. Bagi Panitia Pemira

Bagi mahasiswa yang terlibat dalam panitia pelaksana pemira diharapkan dapat lebih optimal dalam menyiapkan pelaksanaan pemira, lebih masif dalam mensosialisasikan informasi seputar pemira termasuk bagaimana mekanisme penggunaan hak suara dll.

D. Bagi Kontestan Pemira

Bagi mahasiswa yang mendaftar sebagai kontestan pemira diharapkan lebih masif dalam melakukan sosialisasi program kerja dan menghadirkan inovasi program yang dapat menjawab kebutuhan mahasiswa sehingga mahasiswa tertarik untuk berpartisipasi dalam pemira FKIP selanjutnya.

E. Bagi Peneliti Selanjutnya

Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini hanya terdiri atas satu variabel, diharapkan bagi penelitian selanjutnya mampu memfokuskan penelitiannya tentang variabel lain sehingga nantinya dapat meneliti variabel yang belum terinterpretasikan di dalam variabel penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, H., I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afrilia, Merina, Iman Surya dan Letizia Dyastari. 2017. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2015 Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang. *E-journal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 1281-1294.
- Arifin, Anwar. 2014. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmika Rahman. 2018. Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Unimed*. Hal 49.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Darmadi, Hamid. 2012. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Efriza, S.IP. 2013. *Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Faulks, Keith. 2010. *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*. Bandung: Nusa Media.
- Fatwa, Ayuni Nur. 2016. Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 Di desa Sesulu Kabupaten Penajem Paser Utara. *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, 4(4): 1615-1626.
- Fatmariza. 2021. Faktor-Faktor Penyebab Tinggi Rendahnya Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pemilu Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2018-2019 (Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang). *Journal Of Civiv Education*. Vol. 2 No. 3
- Firmansah, S. 2020. Analisis Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Bem Rema IKIP PGRI Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 4 No. 2.

- Gubma FKIP, 2020. Peraturan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemilihan Raya Mahasiswa Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa FKIP Universitas Lampung Pasal 1 ayat 5 dan 6. *Bandar Lampung: FKIP Universitas Lampung*.
- Hasanuddin, Hardini, Muhammad Yusuf Badjido dan Rudi Hardi. 2015. Peran Media Massa Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2013 Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. *E-journal Ilmu Pemerintahan*, V (1): 37-51.
- Ikhsanur Rahman, Suryanef. 2020. Pelaksanaan dan Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM Universitas Negeri Padang menggunakan Sistem Elektronik Voting. *Journal of Civic Education*. Vol. 3 No. 1.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Ketua Pansus Pemira, FKIP. 2020. SK Pansus XXII Pemira FKIP Unila Nomor 10 Tentang Penetapan jumlah kursi DPM FKIP Unila. *Bandar Lampung: FKIP Universitas Lampung*.
- Ketua Pansus Pemira, FKIP. 2020. SK Pansus XXII Pemira FKIP Unila Nomor 18 Tentang Penetapan Pembaruan Daftar Pemilih Tetap Pemira FKIP Universitas Lampung Tahun 2020. *Bandar Lampung: FKIP Universitas Lampung*.
- Khoyin Munawaroh. 2012. *Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan BEM Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember*. Skripsi. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jember.
- Kusmanto, Heri. 2013. Peran Badan Permusyawaratan Rakyat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *e-journal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1(1): 39-47.
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Mendikbud, R. I.1998. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Pasal 2. *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*.
- Miaz, Yalvema. 2012. *Partisipasi Politik (Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi)*. Padang: UNP Press

- Presma, BEM Unila. 2020. Undang-undang Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemira pada Pasal 1 ayat 1 dan 5. *Bandar Lampung: Universitas Lampung*.
- Presiden, R.1. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 66 Paragraf 3. *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*.
- Presiden, R.I. 2015. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Pasal 56 Ayat 1. *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*.
- Rektor Universitas Lampung. 2021. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan Pasal 1 ayat 10, 11 dan 12. *Bandar Lampung: Universitas Lampung*.
- Rivai, Veithzal & Mulyadi, Deddy. 2013. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rush, Michael & Althoff, Philip. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ruslan, Ustman Abdul Muis. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul muslimin*. Solo: Era Intermedia.
- Setiadi, Elly. M dan Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- Sundari Ningrum. 2011. *Klasifikasi Partisipasi*. Jakarta: Grasindo
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Taufik, Hidayat. 2016. Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Legislatif (PILEG) Tahun 2014 Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *E-Journal Pemerintahan Integratif*, 4(4): 562-576.
- Mardikanto, T dan Soebiato, P. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Yuriza, Rahmadano. 2020. *Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih; Studi Kasus Rendahnya Partisipasi Politik Mahasiswa UNP Dalam Pemilu BEM UNP pada Tahun 2019*. Skripsi. Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Wahyudi, Hasbi., Tantio Fernando & Azhari Ahmad. 2013. Peran Kepercayaan Politik dan Kepuasan Demokrasi Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. *E-Journal Psikologi*, 9(2): 95-99.

Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers

Widagdo, Suwignyo. 2016. *Peran Ketokohan, Ikatan Emosional dan Program Kerja Dalam Memengaruhi Perilaku Memilih (Pendekatan Pemasaran Politik Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa*. *Dinamika Global*